KEBIJAKAN OLAHRAGA DALAM PEMERINTAHAN LOKAL: Sebuah Penelitian dalam Merumuskan Rancangan Induk Pembangunan Olahraga Nasional**Adi Rahadian¹⁾, Amung Ma'mun²⁾**adirahadian@upi.eduamung@upi.edu**Universitas Pendidikan Indonesia**

Abstrak. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga ruang lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan melalui sistem kompetisi, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional. Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan olahraga mengacu pada tiga konsep: (1) konsep tradisional; (2) konsep *house of sport*; dan (3) konsep pembangunan olahraga aktual ala Inggris. Dengan kata lain, pembangunan olahraga selain berperan dalam peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan arah kebijakan dan rencana strategis dalam penentuan skala prioritas pembangunan olahraga nasional.

Kata kunci: Kebijakan, Pembangunan Olahraga, Pemerintahan

SPORTS POLICY IN LOCAL GOVERNMENT: A Research in Formulating the Master Plan for National Sports Development

Adi Rahadian¹⁾, Amung Ma'mun²⁾

adirahadian@upi.edu

amung@upi.edu

Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract. Government policy in the development of sports is one of the pillars for maintaining health and fitness which can support the productivity of human resources. Sports development includes educational sports, recreational sports, and sports achievements. The three scope of the sport is carried out through the development and development of sports in a planned, systematic, tiered, and sustainable manner, which begins with civilization with the introduction of motion at an early age, monitoring by making sport a lifestyle, nursery by tracing talent and empowering sports centers through a system of competition, as well as an increase in achievements by fostering national flagship sports so that reliable sportsmen can reach the peak of achievement. Besides that sports can also build national character and identity through values of sportsmanship, discipline, dynamic, and the ethos of hard work. Sports achievements can lift the dignity, dignity and honor of the nation in the eyes of the world, strengthen the unity and unity of the nation, and strengthen national security. The government policy in sports development refers to three concepts: (1) traditional concepts; (2) house of sport concept; and (3) the concept of the development of actual sports in the style of England. In other words, the development of sports in addition to playing a role in improving the health status and quality of life of the community also has a role in improving the welfare of the community in accordance with the direction of strategic policies and plans in determining the priority scale of national sports development.

Keywords: *Policy, Sports Development, Government*

KEBIJAKAN OLAHRAGA DALAM PEMERINTAHAN LOKAL: Sebuah Penelitian dalam Merumuskan Rancangan Induk Pembangunan Olahraga Nasional

Pendahuluan

Peran Strategis Olahraga dalam Pembangunan

Pemerintah sangat menyadari tentang peran strategis olahraga sehingga menempatkan pembangunan keolahragaan sebagai bagian yang sangat penting dalam agenda pembangunan sumber daya manusia sebagaimana penegasan fungsi olahraga dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional “Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kebugaran jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat”. Muara dan tujuan dari penyelenggaraan dan pembangunan keolahragaan harus berbasis dan diorientasikan sepenuhnya pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Olahraga dapat memberi pengaruh positif pada kesehatan masyarakat, sosialisasi anak-anak, remaja dan orang dewasa, termasuk proses inklusi sosial orang-orang yang kurang beruntung, olahraga telah banyak dimanfaatkan untuk pengembangan kualitas hidup di seluruh dunia (Reis, Vieira, & Sousa-Mast, 2016). Olahraga untuk pembangunan dan perdamaian' dalam konteks saat ini, sosial, ekonomi dan ideologi, mengidentifikasi bahwa meningkatnya jumlah lembaga dan penyelenggara yang terlibat dalam skala nasional dan internasional, dalam mendiskusikan masalah tersebut untuk menjadi topik kajian. (Kidd, 2008)

Di Indonesia, semua sektor pembangunan nasional dalam pemerintahan negara harus masuk menjadi bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004). Perencanaan pembangunan olahraga harus disusun dengan standar tertentu agar dapat memberikan kesempatan dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi permintaan, memuaskan kelompok pemangku kepentingan, memenuhi kebutuhan target partisipasi, dan memberikan sistem penghargaan yang memadai termasuk tunjangan yang sebaiknya diperoleh (Veal, 2011). Lebih lanjut perencanaan strategis sangat penting dirumuskan dan dijalankan untuk mengisi kebutuhan era baru posisi *sport for development and peace* (SDP) yang telah menjadi isu penting dan besar akhir-akhir ini (Schulenkorf, 2012; Langer, 2015; Welty Peachey & Burton, 2017). Dalam tataran mikro, pengembangan salah satu cabang olahraga agar berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus mempertimbangkan tiga hal pokok, yaitu: pemangku kepentingan pengembangan olahraga, strategi pengembangan olahraga, dan jalur pengembangan olahraga yang terangkum dalam perencanaan yang baik (Sotiriadou, 2013).

Perubahan global mengantarkan dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa Indonesia menjadi sebuah keharusan dalam tatanan pengelolaan keolahragaan nasional yang menyeluruh dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sinergitas semua aspek. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Lawson (2003): (1) Menghasilkan dan memperkuat jaringan sosial (*sosial network*); (2) membentuk identitas kolektif (*collective identities*); (3) memperbaiki kesehatan manusia dan lingkungan; dan (4) meningkatkan kesehatan mental individu dan keluarga. Jelas bahwa investasi publik oleh pemerintah dalam olahraga mencerminkan berbagai tujuan kebijakan nasional dan internasional sesuai hasil yang diinginkan, penting di antara mereka yang dicari dari keuntungan politik melalui nasionalisme dan sportivitas (Hoberman 1993, 2004). Olahraga dalam wilayah politik seperti dua sisi mata uang, karena seringkali pemimpin politik memanfaatkan olahraga untuk menerapkan kebijakannya terutama dalam membangun rasa nasionalisme dan identitas diri kebangsaan (Adams, 2002; and Gleaves & Llewellyn, 2014).

Sistem keolahragaan nasional mampu mendukung, mendorong, serta melindungi pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dengan memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan dan memaksimalkan potensi daerah dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara mandiri berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan keolahragaan. Dimana sektor masyarakat dan swasta berperan di dalamnya (Kay, 2013). Pendekatan multidimensi terhadap pengukuran keefektifan evaluasi kebijakan olahraga elit (tingkat meso) dengan memeriksa siklus empat tahun kebijakan olahraga elit di Flanders menyimpulkan bahwa, pengembangan kerangka kerja (dokumen perencanaan) dalam rangka menilai efektivitas kebijakan olahraga elit bangsa-bangsa sangat penting keberadaannya (De Bosscher, Shilbury, Theeboom, van Hoecke, & de Knop, 2011). Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja diantara pihak terkait dengan mengedepankan harmonis, terbuka, sinergis, dan saling menguntungkan. Olahraga sebagai budaya identik dengan pemahaman hakikat dan makna olahraga yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari secara meluas, walaupun kegiatan olahraga sebagai gaya hidup masyarakat memiliki kategorisasi dan terkait dengan keterampilan fisik yang menjadi modal simbolis subkultur dan merupakan pusat dalam praktik olahraga sebagai gaya hidup, baik eksklusif maupun inklusif (Rannikko, Harinen, Torvinen, & Liikanen, 2016).

Pembahasan

A. Perubahan Sosial dalam Pembangunan Keolahragaan Nasional

Secara operasional pengembangan kebijakan olahraga di Indonesia semestinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dimana perencanaan strategis yang bersifat jangka panjang terlebih dahulu dirumuskan dengan baik. Olahraga telah disetujui kehadirannya sebagai instrumen atau wahana dalam melakukan perubahan sosial kemasyarakatan untuk perolehan hidup yang berkualitas (Bruening et al., 2015). Rumusan perencanaan strategis harus bersifat komprehensif, terukur, berjangka panjang, dan berkelanjutan. Tetapi dalam kenyataannya hal ini belum terjadi dengan baik untuk kasus di Indonesia, yang ada masih dalam tataran mikro bahwa perencanaan olahraga masih tidak sesuai dalam batas pemaknaan olahraga, sehingga pengembangan kebijakan olahraga masih ditujukan dalam rangka mempersiapkan berbagai kegiatan multievent olahraga nasional dan internasional. Di beberapa negara maju, pembangunan dan kebijakan olahraga masuk dalam gagasan perencanaan negara termasuk kota, seperti yang didefinisikan oleh Merlin dan Choay (2009), ia menyarankan untuk mempertanyakan esensi kebijakan publik yang bertindak dibalik logika perencanaan sambil memobilisasi pelaku bisnis, asosiasi, populasi, dan administrasi (Roult & Machemehl, 2016).

Semangat otonomi dan desentralisasi mengatur pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara tegas antara hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Koordinasi dan hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan horizontal antar berbagai lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional ditegaskan secara detail. Peran pemerintah dalam mengembangkan sekolah untuk mengintegrasikan kegiatan olahraga selain pendidikan jasmani dan olahraga sebagai intrakurikuler, adalah juga ekstrakurikuler, klub olahraga sekolah, kelas olahraga, dan sekolah olahraga. Sistem pembiayaannya membutuhkan perencanaan jangka panjang dengan lintas kelembagaan/kementerian dalam kebijakan pemerintah pusat disertai dengan pengalokasian secara khusus dalam sistem pendanaan pembangunan di daerah, baik pada pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya secara bertahap. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang sifatnya ekstrakurikuler, klub olahraga sekolah dan sekolah olahraga membutuhkan sistem kompetisi yang berjalan sepanjang tahun. Pembinaan olahraga masyarakat, fasilitas, ilmiah dan dukungan medis serta kompetisi yang tepat. (Kidd, 2008). Oleh karena itu, integralisasi sistem kompetisi dari awal, junior, senior dan elit atlet berlangsung secara simultan berbasis masyarakat dan

memerlukan kehadiran pemerintah dalam mengatur jalannya kompetisi sebagaimana seharusnya (Gulbin, Croser, Morley, & Weissensteiner, 2013). Dengan demikian sistem kompetisi yang melibatkan perkumpulan olahraga sekolah sebaiknya menjadi bagian dalam sistem kompetisi olahraga secara menyeluruh, baik lokal, nasional maupun internasional. Basis pembinaan olahraga yang melibatkan kaum pelajar dalam sebuah perkumpulan memberikan dampak sosial yang luar biasa, antara lain perbincangan besarnya manfaat terhadap pengembangan kecakapan hidup seseorang sebagai akibat keterlibatannya dalam olahraga. Pengembangan instrumennya mengandung komponen: kerja sama (*teamwork*), penetapan tujuan (*goal setting*), pengelolaan waktu (*time management*), keterampilan emosional (*emotional skills*), komunikasi (*communication*), keterampilan sosial (*social skills*), kepemimpinan (*leadership*), pemecahan masalah (*problem solving*), dan pengambilan keputusan (*decision making*) (Cronin & Allen, 2017). Hal tersebut bertujuan menciptakan rencana terpadu dan berkelanjutan mencapai tujuan keolahragaan nasional sebagai suatu negara yang masyarakatnya maju, modern dan berbudaya, biasanya telah menempatkan kegiatan olahraga sebagai bagian integral dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya, karena olahraga telah teruji signifikan pengaruhnya terhadap pengembangan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat, di samping lebih jauh dari itu bahwa olahraga sudah masuk dalam wilayah mengejar kemajuan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya dalam melakukan perubahan sosial, (Lyras & Welty Peachey, 2011; Bloodworth et al., 2012; Sherry, Schulenkorf, & Chalip, 2015). Dalam sistem penyusunan kebijakan pembangunan olahraga, modal olahraga bukanlah hal baru, akan tetapi sebagai proposisi teoritis yang holistik dan koheren, modal olahraga dapat memberi lensa baru pada perilaku olahraga dan faktor penentu yang diyakini berpotensi membuka kunci wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tertentu, yaitu bahwa olahraga pada gilirannya akan memberikan sebuah dasar untuk intervensi kebijakan publik yang lebih efektif (Rowe, 2014).

Kebijakan, pendukung, dan strategi merupakan tiga pilar utama yang harus dipenuhi agar pembangunan olahraga dapat memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan dalam UU SKN Nomor 3 Tahun 2005. Kebijakan dalam hal ini adalah meletakkan isu pembangunan keolahragaan sebagai salah satu isu prioritas utama dalam formasi kebijakan pembangunan secara umum termasuk menyediakan payung hukum atau regulasi yang mengatur landasan konseptual, strategi, tata kelola, dan distribusi wewenang dan tanggung jawab anat pemangku kepentingan di sektor olahraga termasuk postur anggaran yang dialokasikan. Kebijakan pemerintah masuk dalam lingkup seputar konsep pembangunan melalui olahraga guna membangun kemajuan negara berdasarkan nilai-nilai dan spirit olahraga di samping

menegakkan budaya olahraga yang kuat (Yamamoto, 2012; Ha, Lee, & Ok, 2015; and Park, Lim, Park, & Lim, 2016). Pendukung adalah manajemen bina prestasi yang mampu membangun dan mengelola siklus dan integrasi antar masing-masing badan atau organisasi yang bertanggung jawab pada ruang lingkup keolahragaan dari mulai olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, samapai dengan olahraga presatsi. Strategi sebagai upaya untuk mengatur tentang pendistribusian pembinaan cabang olahraga tertentu yang berbasis pada potensi kedaerahan sehingga mampu menyederhanakan struktur dan postur pembiayaan kegiatan dan kesinambungan program karena keterbatasan anggaran. Perencanaan strategis pada umumnya ditetapkan jauh sebelumnya, bersandarkan pada peraturan perundang-undangan, baik yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, dan hal itu mengingatkan untuk mencegah ketidakadilan sehingga diperlukan penguatan administrasi dan tata kelola pemerintahan agar dapat dirumuskan perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu (Binns & Nel, 2002). Dalam perspektif ekonomi dan bisnis guna meraih hasil yang baik perlu mengatasi kualitas secara terstruktur dan berjangka panjang, hal tersebut akan menjadi mudah dilaksanakan manakala semua program yang akan dijalankan tertuang dalam perencanaan strategis yang sifatnya komprehensif dengan menampakan keunggulan yang berkelanjutan (Sandholm, 2005).

B. Pengembangan olahraga menjadi pengembangan melalui olahraga

Pembangunan keolahragaan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mencapai kualitas keberhasilan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*) melingkupi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara proporsional, sehingga tercipta interaksi sinergis yang berlangsung secara sistematis, berjenjang, berkelanjutan melalui tahap pembudayaan, pemasaan, pembibitan, dan peningkatan prestasi hingga sampai pada puncak prestasi yang membentuk bangunan piramida sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. *Sport Development Index* (SDI) atau bisa diterjemahkan sebagai Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) sebagai istilah dalam metode pengukuran untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga yang mana sebagai suatu proses membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Dijelaskan lebih lanjut Cholik dan Maksum (2007:7) “SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar yang terukur: (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga; (2) sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga; (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan; (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh

masyarakat. Setelah secara teoritis banyak ditemukan makna olahraga yang begitu dalam dan luas, kemudian disandingkan dengan hasil diskusi terbatas, diperoleh catatan penting bahwa kebermaknaan olahraga telah disetujui pergeserannya dari hanya sekedar aktivitas jasmani untuk tujuan pendidikan, kesehatan, pengisian waktu senggang, termasuk perolehan keterampilan menjadi beriringan dengan perolehan kualitas hidup yang sehat, maju dan berbudaya, baik dalam konteks hidup secara pribadi, kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan ini telah cukup kuat mengubah paradigma berpikir konsep pembangunan olahraga Indonesia menjadi pembangunan Indonesia melalui olahraga seiring dengan yang telah menjadi isu besar *sport for development and peace* (SDP) di banyak negara di dunia (Kidd, 2008). Akhir-akhir ini telah banyak dijadikan bahan pijakan bahwa olahraga dapat menjadi arena dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dimana empat hal menjadi dasarnya, yaitu bahwa setiap kegiatan olahraga memiliki konsep, prinsip, taktik, dan strategi, keempat hal tersebut tergambar dalam elemen-elemen penting di dalamnya, yaitu: peristiwa mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan (Humphries, 2017). *Sport for Development and Peace* (SDP) menawarkan pendekatan praktis bagaimana program olahraga dapat dikonseptualisasikan dan diorganisasikan sebagai bagian dari pendekatan holistik terhadap pembangunan dan bukan hanya instrumennya (Darnell & Dao, 2017). Olahraga untuk pengembangan dan perdamaian (SDP) adalah bidang aktivitas yang berkembang pesat dimana olahraga digunakan sebagai alat intervensi untuk mengejar sasaran sosial yang lebih luas dan tidak hanya tujuan olahraga itu semata (Giulianotti, Hognestad, & Spaaij, 2016). Sedangkan unsur-unsur lainnya, seperti pentingnya penerapan *sport science*, penelitian dan pengembangan, telaah keberbakatan, pengembangan sumber daya pendukung, akreditasi sistem pembinaan dan pengembangan, pengembangan sukarelawan olahraga, penguatan *sport governance*, pengembangan asosiasi keolahragaan, pengembangan olahraga disabilitas, pengembangan keahlian kelembagaan pendidikan akademik, profesi dan vokasi, dan tradisional sport, sponsorsif, akan masuk di dalam prioritas tiga fokus utama tersebut di atas sehingga akan seiring sejalan dan terumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan olahraga jangka panjang. (Ma'mun, 2014).

Kesimpulan

Pembangunan olahraga dirumuskan melalui sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional yang diatur dengan otonomi lokal guna mewujudkan kemampuan dan memaksimalkan potensi lokal dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara mandiri berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan keolahragaan. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara tegas antara hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Koordinasi dan hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan horizontal antar berbagai lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Kebijakan yang dijalankan bersumberkan dari perencanaan yang menyeluruh, terstruktur, terukur, berjangka waktu panjang, dan berkelanjutan. Dalam hal ini adalah meletakkan isu pembangunan keolahragaan sebagai salah satu isu prioritas utama dalam formasi kebijakan pembangunan secara umum termasuk menyediakan payung hukum atau regulasi yang mengatur landasan konseptual, strategi, tata kelola, dan distribusi wewenang dan tanggung jawab anat pemangku kepentingan di sektor olahraga termasuk postur anggaran yang dialokasikan. Visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program yang dirumuskan dalam perencanaan pembangunan olahraga jangka panjang menempatkan substansi olahraga sebagai instrumen pembangunan dengan capaian pembangunan olahraga dari *development of sport* menjadi *development through sport*.

Daftar Pustaka

- Adams, I. (2002). Pancasila: Sport and the Building of Indonesia- Ambitions and Obstacles. *The International Journal of the History of Sport* . Available Online: 08 Sep 2010. Downloaded by [Universiti Teknologi Malaysia] from Routledge Taylor {&}Francis, 19(Iss. 2-3), 295–318. <https://doi.org/10.1080/714001759>
- Binns, T., & Nel, E. (2002). Devolving Development: Integrated Development Planning and Developmental Local Government in Post-apartheid South Africa. *Regional Studies*, 36(8), 921–932. <https://doi.org/10.1080/0034340022000012342>
- Bloodworth, A., Mcnamee, M., Bailey, R., Bloodworth, A., Mcnamee, M., & Bailey, R. (2012). Sport , physical activity and well-being : an objectivist account Sport , physical activity and well-being : an objectivist account, (October 2014), 37–41. <https://doi.org/10.1080/13573322.2011.608948>
- Bruening, J. E., Peachey, J. W., Evanovich, J. M., Fuller, R. D., Murty, C. J. C., Percy, V. E., ... Chung, M. (2015). Managing sport for social change: The effects of intentional design and structure in a sport-based service learning initiative. *Sport Management Review*, 18(1), 69–85. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.07.002>
- Cronin, L. D., & Allen, J. (2017). Development and initial validation of the Life Skills Scale for Sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 28, 105–119. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2016.11.001>
- Darnell, S. C., & Dao, M. (2017). Considering sport for development and peace through the capabilities approach. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2014(September), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1314772>
- De Bosscher, V., Shilbury, D., Theeboom, M., van Hoecke, J., & de Knop, P. (2011). Effectiveness of National Elite Sport Policies: A Multidimensional Approach Applied to the Case of Flanders. *European Sport Management Quarterly*, 2(October 2016), 115–141. <https://doi.org/10.1080/16184742.2011.559133>
- Giulianotti, R., Hognestad, H., & Spaaij, R. (2016). Sport for Development and Peace: Power, Politics, and Patronage. *Journal of Global Sport Management*, 1(3–4), 129–141. <https://doi.org/10.1080/24704067.2016.1231926>
- Gleaves, J., & Llewellyn, M. (2014). Ethics, Nationalism, and the Imagined Community: The Case Against Inter-National Sport. *Journal of the Philosophy of Sport*, 41(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/00948705.2013.785427>
- Gulbin, J. P., Croser, M. J., Morley, E. J., & Weissensteiner, J. R. (2013). An integrated framework for the optimisation of sport and athlete development: a practitioner approach. *Journal of Sports Sciences*, 31(12), 1319–31. <https://doi.org/10.1080/02640414.2013.781661>
- Hoberman, J., 1993. Sport and ideology in the post-communist age. In : L. Allison, ed. *Yang berubah politics of sport* . Manchester: Manchester University Press, 15–36.
- Hoberman, J., 2004. Sportive nationalism and globalization. In : J. Bale and MK Christensen, eds.
- Humphries, C. (2017). Critical Thinking in Physical Education, 4562(October). <https://doi.org/10.1080/08924562.2014.938877>
- Kay, J. (2013). “Maintaining the Traditions of British Sport”? The Private Sports Club in the Twentieth Century. *The International Journal of the History of Sport*, 30(14), 1655–1669. <https://doi.org/10.1080/09523367.2013.831839>

- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. 2010. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2007: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*.
- Kidd, B. (2008). A new social movement: Sport for development and peace. *Sport in Society*, 11(4), 370–380. <https://doi.org/10.1080/17430430802019268>
- Lyras, A., & Welty Peachey, J. (2011). Integrating sport-for-development theory and praxis. *Sport Management Review*, 14(4), 311–326. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2011.05.006>
- Ma'mun, A. (2014). Perspektif Kebijakan Pembangunan Olahraga dalam Era Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 4(2), 131–146.
- Park, J., Lim, S., Park, J., & Lim, S. (2016). A chronological review of the development of elite sport policy in South Korea policy in South Korea, 599(March). <https://doi.org/10.1080/21640599.2015.1127941>
- Reis, A. C., Vieira, M. C., & Sousa-Mast, F. R. de. (2016). “Sport for Development” in developing countries: The case of the Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro. *Sport Management Review*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2015.01.005>
- Roult, R., & Machemehl, C. (2016). Territorial development and planning of sporting and leisure facilities/Aménagement et planification territoriale des installations sportives et de loisir. *Loisir et Société / Society and Leisure*, 39(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/07053436.2016.1151227>
- Rowe, N. F. (2014). International Journal of Sport Policy Sporting capital : a theoretical and empirical analysis of sport participation determinants and its application to sports development policy and practice, (February 2015), 37–41. <https://doi.org/10.1080/19406940.2014.915228>
- Sandholm, L. (2005). Strategic plan for sustainable excellence. *Total Quality Management & Business Excellence*, 16(8–9), 1061–1068. <https://doi.org/10.1080/14783360500163284>
- Schulenkorf, N. (2012). Sustainable community development through sport and events: A conceptual framework for Sport-for-Development projects. *Sport Management Review*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2011.06.001>
- Sherry, E., Schulenkorf, N., & Chalip, L. (2015). Managing sport for social change: The state of play. *Sport Management Review*, 18(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.12.001>
- Sotiriadou, P. (2013). Sport development planning: The Sunny Golf Club. *Sport Management Review*, 16(4), 514–523. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2012.09.002>
- Veal, A. J. J. (2011). Planning for leisure, sport, tourism and the arts: goals and rationales. *World Leisure Journal*, 53(2), 119–148. <https://doi.org/10.1080/04419057.2011.580553>
- Welty Peachey, J., & Burton, L. (2017). Servant Leadership in Sport for Development and Peace: A Way Forward. *Quest*, 69(1), 125–139. <https://doi.org/10.1080/00336297.2016.1165123>
- Yamamoto, M. Y. (2012). International Journal of Sport Policy Development of the sporting nation : sport as a strategic area of national policy in Japan. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 4(July), 277–296. <https://doi.org/10.1080/19406940.2012.685489>